



**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

RENCANA KERJA

20

23

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, diamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

RENWAL RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, dan juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Kiranya Renwal Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat menjadi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dalam penyediaan barang/jasa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Palangka Raya, 2021
Plt. KEPALA BIRO

SUHARNO, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 196808061989031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
4.1 Program dan Kegiatan	26
BAB V PENUTUP	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 3.3 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana awal Kerja (Renwal) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renwal Rencana Kerja (Renwal Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam

Renja SKPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas Daerah.

Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun *stakeholders* dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renwal Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); dan

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar bagian yang ada di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja (Renwal Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Bab I **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan yang meliputi : latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja).
- Bab II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023 dan 2024, kaitannya terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan yang terkait dengan tupoksi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan apabila terdapat rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
- BAB V **PENUTUP**
Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dan evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Tujuan evaluasi kinerja RENJA PD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 antara lain untuk mengidentifikasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi entry point dalam penyusunan RENWAL RENJA PD Tahun 2022. Selain itu, evaluasi kinerja Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengukuran kinerja Biro PBJ didasarkan pada sasaran strategis dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Utama Biro PBJ Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	20 %	
	Ketersediaan Layanan Secara Elektronik	100%	

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel : Terlampir Pada table 2.1 pada bahan lampiran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membina, mengoordinasikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN/Hibah/Dana Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SOPD yang menjadi tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator yang mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan RENSTRA atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja indikator Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan RENSTRA yang berdasarkan atas hasil standar kebutuhan pelayanan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada : Terlampir Pada table 2.2 pada bahan lampiran

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan output yang dihasilkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tingkat implementasi program dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak terlepas dari pelayanan terhadap Perangkat Daerah maupun masyarakat luas. Bidang urusan yang dilaksanakan yaitu urusan urusan pengadaan barang/jasa. Dalam rangka mewujudkan urusan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, profesional, terbuka dan kredibel, dapat dilaporkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2021 menerima usulan paket yang dilelang sebanyak 315 paket (APBD dan APBN), dengan rincian hasil lelang sebagai berikut.:

1. Dari total usulan 315 paket pengadaan barang/jasa yang masuk, sebanyak 315 paket telah dilaksanakan lelangnya dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 315 paket telah ditetapkan pemenang dan perikatan kontrak.
 - 2) 0 paket dengan status tender gagal/dibatalkan oleh PPK.
2. Total nilai terekontrak baik APBN dan APBD dari 315 paket tersebut mencapai Rp. 531,477,717,418,- .

Dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, tentunya terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum sepenuhnya diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
2. Usulan paket tender sering tidak sesuai dengan penjadwalan yang tertera dalam SiRUP.
3. Masih terbatasnya kapasitas SDM pada PD terkait ketentuan dan mekanisme pengusulan paket tender/seleksi yang mengakibatkan paket tidak siap untuk ditender karena kekurangan persyaratan.
4. Kurang SDM Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan PNS pada Biro PBJ.

Permasalahan tersebut diatas masih dapat ditangani sehingga dampak terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur tidak berdampak secara langsung. Hal tersebut juga didasarkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Perangkat Daerah yang bersifat administratif sehingga dampak yang dihasilkan tidak dapat terlihat secara langsung. Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan/ solusi guna mengantisipasi hambatan dan kendala diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan diseminasi dan literasi kepada PD baik secara koordinasi dan secara administrasi dengan penegasan melalui Surat Sekretaris Daerah maupun rapat-rapat dalam rangka mekanisme dan ketentuan pengusulan tender paket pengadaan barang dan jasa setelah anggaran disahkan oleh Kepala Daerah dan DPRD.
- 2) Mewujudkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berbasis web/teknologi informasi melalui Sistem Informasi Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (SIAPBAJASA) guna efektivitas dan transparansi dalam mekanisme proses pemilihan

penyedia barang/jasa maupun dokumen dapat menjadi lebih baik dan akuntabel.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan Ranwal RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program/Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai dan mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan RENJA 2023 telah ditampung semuanya dalam RKPD, Oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan baik penambahan maupun penghapusan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: Terlampir Pada table 2.3 pada bahan lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu unit kerja administratif yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang pengadaan barang/jasa. Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi hanya bersifat administratif baik dalam bentuk fasilitasi, monitoring dan evaluasi maupun perumusan kebijakan, sehingga dalam program/kegiatan yang direncanakan tidak secara langsung menampung program/kegiatan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah lainnya. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka perlu penyesuaian arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya berkaitan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Melalui Rencana Strategis arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan

Jasa yaitu penyelarasan dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa arah kebijakan nasional dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan peningkatan keadilan, transparansi dan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Kementerian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENWAL RENJA Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yaitu :

Program :

1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
2. Kebijakan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
9. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
11. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja
12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

13. Sosialisasi Peraturan Perundangan
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu
17. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
23. Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa
24. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
25. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
26. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
27. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
28. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
29. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadan Barang dan Jasa
30. Pembinaan Kelembagaan Pengadan Barang dan Jasa
31. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
(2023) dan Prakiraan Maju Tahun (2024)

N/b. Dapat dilihat pada lampiran table 3.3 pada bahan lampiran

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mencakup 2 program yang terdiri dari 26 kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 12) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 15) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa
- 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 4) Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 7) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
- 8) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 9) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Rumusan rencana program dan kegiatan SOPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 untuk sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

n/b. Dapat dilihat pada table lampiran 3.3

BAB V

P E N U T U P

RENWAL RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke-2 (tiga) RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menyesuaikan ke RPJMD dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

RENWAL RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menjadi dasar untuk penetapan KUA-PPAS, RKA dan DPA-SOPD Tahun Anggaran 2023 sebagai manifestasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan RENWAL RENJA SOPD Tahun 2023 ini juga sebagai acuan pertanggung jawaban Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.

Demikian RENJA Awal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Februari 2022

Plt. KEPALA BIRO,

SUHARNO, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 196808061989031013

**KERTAS KERJA FORMAT PENYAJIAN RENJA PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nama OPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sistematika Penulisan	Informasi yang Disajikan (Berdasar Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Ada/tidak
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	a. Penjelasan umum mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	
1.2. Landasan Hukum	b. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	
1.3. Maksud dan Tujuan	c. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	
1.4. Sistematika Penulisan	d. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2019		
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD	<p>a. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 	

Sistematika Penulisan	Informasi yang Disajikan (Berdasar Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Ada/tidak
	<p>b. Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (2019) Provinsi Kalimantan Tengah</p>	
<p>2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p>	<p>a. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p>	
<p>2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</p>	<p>b. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>a. 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Berisikan uraian mengenai: Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.</p>	
<p>2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD</p>	<p>a. 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.</p>	
	<p>b. Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021</p>	

Sistematika Penulisan	Informasi yang Disajikan (Berdasar Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Ada/tidak
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	<p>a. Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkiat langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 	

Sistematika Penulisan	Informasi yang Disajikan (Berdasar Permendagri No. 86 Tahun 2017)	Ada/tidak
	b. Tabel-2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT		
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.	
3.3. Program dan Kegiatan	<p>Berisikan penjelasan mengenai:</p> <p>a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian visi dan misi kepala daerah, • Pencapaian SDGs, • Pengentasan kemiskinan, • Pencapaian NSPK dan SPM, • Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, • Pengembangan daerah terisolir, • Dsb. <p>b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program dan jumlah kegiatan. - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). <p>Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.</p> <p>c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.</p> <p>d. Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah</p>	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
BAB V PENUTUP	a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	
	b. Kaidah-kaidah pelaksanaan	
	c. Rencana Tindak Lanjut.	
	Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan	

Saran Perbaikan
Hal 2 : PP 58 / 2005 sdh diganti dengan PP 12 / 2019.

Saran Perbaikan

kolom 5 isinya realisasi s/d tahun 2018 (n-3), yang artinya merupakan kompilasi realisasi mulai tahun pertama renstra s/d 2018

kolom 6 isinya target 2019 (n-2)

kolom 7 isinya realisasi 2019 (n-2)

kolom 9 isinya target tahun 2020 (n-1)

--

--

--

--

--

Saran Perbaikan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (2021)
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2022)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4) 11=(10/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.06.406.01.06.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pengiriman surat dan tersedianya mefural untuk keperluan administrasi perkantoran pada Biro PBJ	4.01.01.1.08.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Surat/Paket terkirim dalam tahun dan tersedia materi untuk keperluan administrasi perkantoran pada Biro PBJ	1.500 Paket	1.500 Paket	1.500 Paket	1.500 Paket	100	1500 Paket	4500	3 %
4.06.4.06.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan jaringan internet dan telekomunikasi	4.01.01.1.08.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelancaran Pelaksanaan tugas Aparatur Biro PBJ, Sekretariat UKPBJ dan Tim PokjaUKPBJ dengan Dukungan sarana Telekomunikasi yang Memadai	7 Layanan	7 Layanan Internet	7 Layanan Internet	7 Layanan Internet	98.53	7 Layanan	21	3 %
4.06.406.01.06.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	4.01.01.1.08.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kegiatan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan serta pengolahan administrasi aset dan barang dapat dilaksanakan dengan baik (Honor Tenaga Kontrak)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	98,41%	1 Paket	3	3 %
4.06.4.06.01.01.09	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terperuhnya perbaikan peralatan cetakan dan mesin lainnya	4.01.01.1.09.06	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terperuhnya perbaikan peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3	3 %
4.06.4.06.01.06.01.10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	4.01.01.1.06.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perengkapan Kantor	39 ATK	39 Jenis ATK	39 Jenis ATK	39 Jenis ATK	100,00%	39 Jenis ATK	117	3 %
4.06.4.06.01.01.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	4.01.01.1.06.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3	3 %
4.06.406.01.01.13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	3 Paket	3	3 %
4.06.4.06.01.06.01.17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terperuhnya penyediaan makanan dan minuman	4.01.01.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terperuhnya Fasilitasi Kunjungan tamu	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,9%	12 bulan	36	3 %
4.06.406.01.06.01.18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terperuhnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.01.01.1.06.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terperuhnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,69%	12 bulan	36	3 %
4.06.4.06.01.06.01.19	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terperuhnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	36	3 %
4.06.4.06.01.06.01.46	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya kegiatan perencanaan dan move ke dalam daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,07%	12 bulan	36	3 %
4.06.4.6.0306.5.21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Meningkatkan kualitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4.01.07.1.03.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksannnya Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	1 Laporan	1,00 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	1 Laporan	2	2 %
4.06.4.06.01.06.05.170	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terlaksananya Rakor dan hasilnya menjadi bahan masukan di ULP	4.01.07.1.03.02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terlaksannnya Pembinaan Kelembangan pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen	1,00 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	1 Dokumen	3	3 %
4.06.05.003	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya vendor dan aparatur yang memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah		Fasilitasi Kunjungan Tamu		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100,00%	150 Orang	450	3 %
4.06.4.06.01.06.05.109	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya rancana pengembangan ompetensi atau payung hukum/regulasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur pelaksana PBJ, dan terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100,00%	150 Orang	450	3 %

4.06.4.06.01.06.05.117	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya keterampilan dan keahlian bidang pengadaan barang/jasa pada aparaturnya pelaksanaan pengadaan dan masyarakat penyedia barang/jasa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	98,20	50 Orang	150	3 %
4.06.4.6.0306.5.xxx	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pejabat pengadaan barang/jasa dengan pembentukan jabatan fungsional pengadaan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0,00%	50 Orang	150	3 %
4.06.05.192	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	4.01.07.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksannnya Pembinaan Kelembagaan pengadaan barang dan jasa	500 Orang	500 Orang	100,00%	500 Orang	0,00%	5 Kegiatan	1500	3 %
X.XX.01.1.02.06	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	0	6	3 %
4.06.06.002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	4.01.01.1.02.07	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00%	0	6	3 %
4.06.06.003	Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4.01.01.1.02.06	Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0	0	0 %
X.XX.01.1.02.09	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	4.01.01.1.02.05	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersusunnya dan Terlaksannnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0	0	0 %
4.06.4.06.01.06.06.06	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tersusunnya RKA dan RKA-P biro PBJ	4.01.01.1.01.02	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6	3 %
4.06.06.010	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya laporan keuangan dan asset pada Biro PBJ	4.01.01.1.02.05	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	3	3 %
4.06.06.033	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Tersusunnya laporan penyerapan anggaran dan terpenuhinya data pada TEPRASIMP3D		Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa		1 Dokumen	1,00 dokumen	100,00%	0,00%	0,00%	1 Dokumen	3	3 %
4.06.4.06.01.06.06.41	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya RPKD dan Laporan Kinerja pada APBD Murni dan Perubahan	4.01.01.1.01.01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen perencanaan, pendendalian, monitoring dan evaluasi Biro PBJ	2 Dokumen	2,00 dokumen	100,00%	0,00%	0,00%	2 Dokumen	6	3 %
4.06.60.001	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rapat Koordinasi ULP se Kalimantan Tengah dan R apat-rapat koordinasi ULP tingkat nasional di Provinsi lain	4.01.07.1.03.02	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pembinaan Kelembagaan pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	1 Dokumen	3	3 %
4.06.4.06.01.06.60.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Penyusunan Kajian Standar pengembangan kompetensi SDM PBJ, Road Map Pengembangan Kompetensi PBJ, Penyusunan Kebijakan Manajemen Resiko PBJ, Penyusunan S OP PBJ yang terintegrasi, Sosialisasi S OP PBJ Yang terintegrasi, PMM (Performance measurement	4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksannnya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	3 %
4.06.4.06.01.06.60.03	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	terpenuhinya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP Provinsi Kalimantan Tengah	4.01.07.1.01.02	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksannnya Pengadaan barang dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	3	3 %
4.06.4.6.0306.60.04	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	tersusunnya dokumen laporan triwulan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP Provinsi Kalimantan Tengah		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		4 Dokumen	4,00 Dokumen	100,00%	95,00%	95,00%	4 Dokumen	12	3 %
4.06.4.6.0306.60.05	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	tersusunnya dokumen laporan Tahunan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP Provinsi Kalimantan Tengah		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	3	3 %
4.06.4.06.01.06.60.06	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	terpenuhinya pengarsipan dokumen Proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP Provinsi Kalimantan Tengah		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0,00%	1 Tahun	3	3 %

4.06.4.06.01.06.60.07	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Penanganan pengaduan dan sanggahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP Provinsi Kalimantan Tengah dan fasilitasi penangahan pengaduan sanggahan pemerintah pada ULP di Kabupaten Kota	4.01.07.1.03.03	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PengadaanBarang dan Jasa	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	98.41%	1 Paket	3	3 %
4.06.4.6.0306.60.08	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Pemanfaatan teknologi informasi layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada ULP Provinsi Kalimantan Tengah	4.04.07.1.02.01	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terdaftarnya dan terverifikasinya penyedia di aplikasi LPSE, pemberian dan perbaikan password kepada penyedia (1 Tahun)	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98.16%	12 bulan	36	3 %
4.06.4.06.01.06.60.09	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya penguatan kelembagaan dan modernisasi pengadaan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	4.01.07.1.03.02	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pembinaan Kelembagaan pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	32.67%	1 Tahun	3	3 %

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	SPM/standar minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun (thn n-2) (2019)	Tahun (thn n-1) (2020)	Tahun (thn n) (2021)	Tahun (thn n+1) (2022)	Tahun (thn n-2) (2019)	Tahun (thn n-1) (2020)	Tahun (thn n) (2021)	Tahun (thn n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah		Jumlah literatur dan bahan sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	7	7	7	-	29%	0%	100%	-
			Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selesai dilaksanakan	700	700	700	-	90,57%	20%	100%	-
			Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikelola	704	704	704	-	90,06%	19,89%	100%	-
2	Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa		Efisiensi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	-	-	-	15%	-	-	-	100%
3	Pengadaan tepat waktu		Proses Pengadaan selesai tepat waktu berdasarkan jumlah paket dan nilai paket pengadaan barang dan jasa	-	-	-	20%	-	-	-	100%
4	Jumlah PPK, PPTK & Pejabat pengadaan yang dilatih menggunakan aplikasi pengadaan per tahun		Pelatihan aplikasi pengadaan (SPSE, SIRUP, Sikap, Monev Online, e-Pengadaan, dll) bagi PPK, PPTK & Pejabat Pengadaan	-	-	-	46	-	-	-	100%
5	Peningkatan sumber daya manusia fungsional pengelola barang/jasa		jumlah peserta Bimtek SDM Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang lulus uji kompetensi	-	-	-	46	-	-	-	100%
6	Ketersediaan sistem layanan secara elektronik (SPSE)		Layanan SPSE dapat diakses sepanjang waktu dilihat dari nilai uptime layanan	-	-	-	100	-	-	-	100%

Catatan
Analisis

13

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun (2021)
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIMANTAN TENGAH						Lembar dari					Catatan Penting
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1,795,000,000	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2,465,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Biro PBJ	1 Tahun	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Biro PBJ	1 Tahun	72,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Tahun	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Tahun	26,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Tahun	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Tahun	26,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Kordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja Kinerja danIkhtisar	1 Tahun	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Kordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja Kinerja danIkhtisar	1 Tahun	26,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				149,960,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				260,000,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro PBJ	1 Tahun	104,960,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro PBJ	1 Tahun	185,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya dan Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya dan Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Dokumen	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	25,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran	1 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				572,534,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				750,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	276,675,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	350,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1 Tahun	25,039,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1 Tahun	35,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan tamu	1 Tahun	10,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan tamu	1 Tahun	15,000,000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	260,320,000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	350,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				935,595,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,250,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Surat/Paket terkirim dalam tahun dan tersedia materai untuk keperluan administrasi perkantoran pada Biro PBJ	1 Tahun	18,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Surat/Paket terkirim dalam tahun dan tersedia materai untuk keperluan administrasi perkantoran pada Biro PBJ	1 Tahun	25,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Tengah	Kelancaran Pelaksanaan tugas Aparatur Biro PBJ, Sekretariat UKPBJ dan Tim PokjaUKPBJ dengan Dukungan sarana Telekomunikasi yang Memadai	1 Tahun	500,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Tengah	Kelancaran Pelaksanaan tugas Aparatur Biro PBJ, Sekretariat UKPBJ dan Tim PokjaUKPBJ dengan Dukungan sarana Telekomunikasi yang Memadai	1 Tahun	640,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 Tahun	110,400,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 Tahun	235,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan administrasi kepegawaian, pengolahan keuangan serta pengolahanadministrasi aset dan barang dapat dilaksanakan dengan baik (Honor Tenaga Kontrak)	1 Tahun	307,195,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan administrasi kepegawaian, pengolahan keuangan serta pengolahanadministrasi aset dan barang dapat dilaksanakan dengan baik (Honor Tenaga Kontrak)	1 Tahun	350,000,000	
	Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41,910,000	Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55,000,000	
	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	41,910,000	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	55,000,000	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1,180,000,000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2,010,000,000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				390,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				600,000,000	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	1 Kegiatan	100,000,000	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	1 Kegiatan	150,000,000	

	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pengadaan barang dan Jasa	1 Tahun	140,000,000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pengadaan barang dan Jasa	1 Tahun	200,000,000	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan barang dan jasa	2 Kegiatan	150,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan barang dan jasa	2 Kegiatan	250,000,000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				350,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				650,000,000	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Terdaftaranya dan terverifikasinya penyedia di aplikasi LPSE, pemberian danperbaikan password kepada penyedia (1 Tahun)	1 Tahun	250,000,000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Terdaftaranya dan terverifikasinya penyedia di aplikasi LPSE, pemberian danperbaikan password kepada penyedia (1 Tahun)	1 Tahun	450,000,000	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpeliharanya Hardware, Software aplikasi SPSE sebanyak 2 server, 150 unitkomputer, dan 2 aplikasi (150 Unit)	1 Tahun	50,000,000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpeliharanya Hardware, Software aplikasi SPSE sebanyak 2 server, 150 unitkomputer, dan 2 aplikasi (150 Unit)	1 Tahun	100,000,000	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersosialisasinya informasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan	1 Tahun	50,000,000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersosialisasinya informasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan	1 Tahun	100,000,000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				440,000,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				760,000,000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	240,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	350,000,000	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pembinaan Kelembagaan pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	150,000,000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pembinaan Kelembagaan pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	250,000,000	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PengadaanBarang dan Jasa	1 Tahun	50,000,000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PengadaanBarang dan Jasa	1 Tahun	160,000,000	
					2,975,000,000					4,475,000,000	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun (2022)
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : **BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	01	01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Biro PBJ	1 Tahun	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Tahun	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Tahun	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Kordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja Kinerja danIkhtisar	1 Tahun	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro PBJ	1 Tahun	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya dan Terlaksannya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Dokumen	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran	1 Dokumen	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1 Tahun	
4	01	01	1.06		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan tamu	1 Tahun	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Surat/Paket terkirim dalam tahun dan tersedia materai untuk keperluan administrasi perkantoran pada Biro PBJ	1 Tahun	

4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Tengah	Kelancaran Pelaksanaan tugas Aparatur Biro PBJ, Sekretariat UKPBJ dan Tim PokjaUKPBJ dengan Dukungan sarana Telekomunikasi yang Memadai	1 Tahun	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	1 Tahun	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan serta pengolahan administrasi aset dan barang dapat dilaksanakan dengan baik (Honor Tenaga Kontrak)	1 Tahun	
4	01	01	1.09		Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	1 Kegiatan	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pengadaan barang dan Jasa	1 Tahun	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pemantaun dan Evaluasi Pengadaan barang dan jasa	2 Kegiatan	
4	04	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
4	04	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Terdaftarnya dan terverivikasinya penyedia di aplikasi LPSE, pemberian dan perbaikan password kepada penyedia (1 Tahun)	1 Tahun	
4	04	07	1.02	01	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpeliharanya Hardware, Software aplikasi SPSE sebanyak 2 server, 150 unitkomputer, dan 2 aplikasi (150 Unit)	1 Tahun	
4	04	07	1.02	01	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersosialisasinya informasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan	1 Tahun	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pembinaan Kelembangaan pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksannnya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PengadaanBarang dan Jasa	1 Tahun	

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2021) dan Prakiraan Maju Tahun (2022)
Provinsi Kalimantan Tengah

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) (2021)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
4	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1,795,000,000							
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95,000,000							
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Biro PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	15,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	15,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	15,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				149,960,000			
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	104,960,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				572,534,800			
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	276,675,800	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	25,039,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.06		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	10,500,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	260,320,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				935,595,200			

4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Paket terkirim dalam tahun dan tersedia materai untuk keperluan administrasi perkantoran pada Biro PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	18,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Pelaksanaan tugas Aparatur Biro PBJ, Sekretariat UKPBJ dan Tim PokjaUKPBJ dengan Dukungan sarana Telekomunikasi yang Memadai	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	500,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	110,400,000	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan serta pengolahan administrasi aset dan barang dapat dilaksanakan dengan baik (Honor Tenaga Kontrak)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	307,195,200	APBD		1 Tahun
4	01	01	1.09		Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41,910,000			
4	01	01	1.09	06	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	41,910,000	APBD		1 Tahun
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1,180,000,000			
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				390,000,000			
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Terlaksannnya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	100,000,000	APBD		1 Kegiatan
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	140,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pemantaun dan Evaluasi Pengadaan barang dan jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Kegiatan	150,000,000	APBD		2 Kegiatan
4	04	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				350,000,000			
4	04	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terdaftar dan terverifikasinya penyedia di aplikasi LPSE, pemberian dan perbaikan password kepada penyedia (1 Tahun)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	250,000,000	APBD		1 Tahun
4	04	07	1.02	01	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terpeliharanya Hardware, Software aplikasi SPSE sebanyak 2 server, 150 unitkomputer, dan 2 aplikasi (150 Unit)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun
4	04	07	1.02	01	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersosialisasinya informasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				440,000,000			
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	240,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pembinaan Kelembangaan pengadaan barang dan jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	150,000,000	APBD		1 Tahun
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PengadaanBarang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun
JUMLAH									2,975,000,000			

Maju Rencana ... (2022)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(10)
2,465,000,000
150,000,000
72,000,000
26,000,000
26,000,000
26,000,000
260,000,000
185,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
750,000,000
350,000,000
35,000,000
15,000,000
350,000,000
1,250,000,000

25,000,000
640,000,000
235,000,000
350,000,000
55,000,000
55,000,000
2,010,000,000
600,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
650,000,000
450,000,000
100,000,000
100,000,000
760,000,000
350,000,000
250,000,000
160,000,000
4,475,000,000

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Perangkat Daerah : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1,795,000,000				2,465,000,000
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95,000,000				150,000,000
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Biro PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	72,000,000
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	15,000,000	APBD		1 Tahun	26,000,000
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	15,000,000	APBD		1 Tahun	26,000,000
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanannya Kordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	15,000,000	APBD		1 Tahun	26,000,000
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				149,960,000				260,000,000
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	104,960,000	APBD		1 Tahun	185,000,000
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dan Terlaksannya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000
4 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				572,534,800				750,000,000
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	276,675,800	APBD		1 Tahun	350,000,000
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	25,039,000	APBD		1 Tahun	35,000,000
4 01 01 1.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	10,500,000	APBD		1 Tahun	15,000,000
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	260,320,000	APBD		1 Tahun	350,000,000

4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				935,595,200				1,250,000,000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Paket terkirim dalam tahun dan tersedia materai untuk keperluan administrasi perkantoran pada Biro PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	18,000,000	APBD		1 Tahun	25,000,000
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Pelaksanaan tugas Aparatur Biro PBJ, Sekretariat UKPBJ dan Tim PokjaUKPBJ dengan Dukungan sarana Telekomunikasi yang Memadai	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	500,000,000	APBD		1 Tahun	640,000,000
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	110,400,000	APBD		1 Tahun	235,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan serta pengolahan administrasi aset dan barang dapat dilaksanakan dengan baik (Honor Tenaga Kontrak)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	307,195,200	APBD		1 Tahun	350,000,000
4	01	01	1.09		Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41,910,000				55,000,000
4	01	01	1.09	06	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	41,910,000	APBD		1 Tahun	55,000,000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1,180,000,000				2,010,000,000
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				390,000,000				600,000,000
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa/	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	100,000,000	APBD		1 Kegiatan	150,000,000
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannya Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	140,000,000	APBD		1 Tahun	200,000,000
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannya Pemantaun dan Evaluasi Pengadaan barang dan jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Kegiatan	150,000,000	APBD		2 Kegiatan	250,000,000
4	04	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				350,000,000				650,000,000
4	04	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terdaftar dan terverifikasinya penyedia di aplikasi LPSE, pemberian dan perbaikan password kepada penyedia (1 Tahun)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	250,000,000	APBD		1 Tahun	450,000,000
4	04	07	1.02	01	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terpeliharanya Hardware, Software aplikasi SPSE sebanyak 2 server, 150 unitkomputer, dan 2 aplikasi (150 Unit)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	100,000,000
4	04	07	1.02	01	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersosialisasinya informasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	100,000,000

4	01	07	1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					440,000,000				760,000,000
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	240,000,000	APBD		1 Tahun	350,000,000
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pembinaan Kelembangaan pengadaan barang dan jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	150,000,000	APBD		1 Tahun	250,000,000
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannnya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PengadaanBarang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	160,000,000
					JUMLAH				2,975,000,000				4,475,000,000